

BAB III
BUDAYA KOSMOPOLITAN DALAM PERSPEKTIF
KH. ABDURRAHMAN WAHID

A. Biografi KH. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal sebagai Gus Dur sering dianggap orang *nyleneh* (aneh). Sosoknya sering berbeda pendapat dengan orang pada umumnya. Dia selalu membela orang-orang minoritas meski akibatnya ia sendiri mendapat hujatan dari orang banyak. Banyak tulisan beliau yang menyinggung tentang islam sendiri dimana kebanyakan orang terjebak pada formalitas agama, namun dalam pandangan beliau bahwa pendidikan islam tidak hanya diajarkan di madrasah atau sekolah saja, namun melalui sekolah-sekolah non agama¹

Jarang orang yang mengetahui bahwa nama yang sebenarnya dari KH. Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil dengan panggilan Gus Dur ini namanya adalah *Abdurrahman Ad-Dahkil* (sang penakluk atau pendobrak). KH. Abdurrahman Wahid merupakan cucu dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama' yakni khadratus syaih KH. Hasyim Asy'ari.

Abdurrahman Wahid dilahirkan pada tanggal 7 September 1940 di Denanyar Jombang, salah satu kabupaten di Jawa Timur dan meninggal pada tanggal 30 Desember 2009.² Ia merupakan anak pertama dari enam

¹ Abdurrahman Wahid, *Islmaku Islam Anda Islam Kita*. (Jakarta: The Wahid Institute. 2006), h. 225

² http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid, diakses pada Sabtu 7 April 2012, jam 11.47 malam

bersaudara. Gus Dur lahir dari keluarga pesantren yang kharismatik, ayah beliau KH. Abdul Wahid Hasyim adalah putera tokoh terkenal KH. Hasyim Asy'ari. Sedangkan ibunya Ny. Hj. Sholeha yang merupakan puteri KH. Bisri Syamsuri salah satu pendiri NU³.

KH. Abdul Wahid Hasyim, ayahanda Gus Dur pernah menjadi menteri agama RI. Sejak berumur 4 tahun Gus Dur harus rela meninggalkan dunia pesantren dan ikut bersama ayahnya yang mendapatkan mandat untuk mewakili KH. Hasyim Asy'ari sebagai ketua jawatan agama ke Jakarta, namun setelah Jepang menyerah akhirnya Gus Dur kembali ke jombang untuk berkumpul bersama keluarga dalam lingkungan pesantren hingga akhirnya kembali ke Jakarta setelah perjanjian perdamaian ditandatangani oleh pihak belanda karena KH. Abdul Wahid Hasyim diangkat menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan yang baru dibentuk pada desember 1949.⁴

Kembali kepada Gus Dur, beliau merupakan tokoh fenomenal baik di lingkungan pesantren, masyarakat Nahdliyin, masyarakat luas di negeri ini. Pergaulannya cukup kompleks tanpa batas perbedaan agama, suku maupun etnis. Realitas ini diakui tidak bisa dipisahkan dari bimbingan kedua orang tua beliau yang cukup kompleks pergaulannya meskipun hidup dalam tradisi pesantren.

Meski demikian hasanah keilmuan sangatlah luas, meski berada dalam tradisi pesantren beliau dikenal sangat inklusif, itu bisa disebabkan karena kompleksnya keilmuan beliau sehingga kebanyakan orang tidak memahami

³ Achmad Junaidi, *Gus Dur Presiden Kyai Indonesia*, (Surabaya: Diantama. 2010), h. 35

⁴ *Ibid*, h. 36.

pola pemikiran beliau karena kecenderungan beliau memegang prinsip-prinsip berfikir pesantren dengan tradisionalnya sembari menggabungkan pola berfikir modern khususnya konsep-konsep kemanusiaan. Kekhasan epistemologi beliau ini menunjukkan bahwa beliau searus dengan adagium yang cukup populer dalam kalangan NU, yaitu *al-muhafadhah ala al-qadim al-salih wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah* (melestari tradisi lama yang baik, dan mengambil hal yang baru yang lebih baik). Maka Gus Dur cukup keras mengingatkan pentingnya menjadi kekhasan menjaga pengetahuan khas bangsa sendiri.⁵

Sehingga dari itu Gus Dur menjadi individu yang cosmopolitan dan senantiasa menawarkan joke-joke segar bukan hanya membangun rasa kritisisme dalam menyikapi persoalan social kehidupan, tapi juga dengan dengan model-model guyonan.

Hingga pada tanggal 30 desember 2009 setelah dirawat di RS Cipto Mengunkusumo Jakarta beliau tutup usia dan di makamkan di pemakaman keluarga pondok pesantren Tebu Ireng Jombang.

1. Jejak Pendidikan KH.Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid di awal pendidikannya ia belajar pada ayahnya (Wahid Hasyim) membaca al Qur'an dan Bahasa Arab. Selain itu di masa muda Abdurrahman Wahid sering dikirim oleh ayahnya ke tempat William Iskandar Bueller untuk belajar sastra dan bahasa asing. Williem Bueller

⁵ Wasid, *Gus Dur Sang Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Inter Pena. 2010), h. 81

adalah orang Jerman yang telah masuk Islam. Sejak kecil membaca merupakan kegemaran Abdurrahman Wahid, bahkan ketika ia masih kecil (15 tahun) Abdurrahman Wahid muda sudah membaca buku sekelas *Das Capital*, sebuah buku yang merupakan magnum opusnya Karl Marx dan menjadi rujukan kaum sosialis dunia, buku filsafat Plato, novel-novel William Boechner, bahkan buku *what is to be done* karya komunis Vladimir Illyich Lenin. Mungkin karena kegemarannya dalam membaca buku-buku inilah yang menjadikan ia bersifat pluralis dan multikultural.⁶

Sebagai seorang yang lahir dari keluarga kiai yang berpengaruh tentu ia tidak akan lepas dari dunia pesantren. Oleh karena itu, ayahnya mengirimkan ia ke pesantren al Munawwir di Krapyak di bawah asuhan KH. Ali Ma'shum. Namun di pesantren tersebut ia belum bisa mengikuti pelajaran secara maksimal baru setelah ia selesai dari sekolah menengah ekonomi pertama di Yogyakarta 1957, ia mulai mengikuti pelajaran di pesantren secara penuh.⁷

Kemudian pada tahun 1957-1959 Abdurrahman Wahid belajar di Pesantren Tegalrejo di bawah asuhan KH. Chudlori. Pada saat inilah ia menemukan kembali dunia spiritualnya yang pernah hilang ketika berada di Yogyakarta. Hal yang menarik ketika ia mondok di Tegalrejo ialah kegemarannya dalam membaca literatur-literatur barat sehingga karena hobinya ini seluruh penghuni pondok tertuju pada Abdurrahman Wahid ketika pertama kali diantar oleh pamannya KH. Bisri Syamsuri dengan membawa

⁶ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, (Jogjakarta: LKiS, 2002), h. 56

⁷ Ibid. h. 51-52

buku-buku bernuansa barat yang sangat tabu di dunia pesantren, bahkan cenderung dinilai kontroversial dengan keilmuan di pesantren.

Kemudian pada pertengahan 1959, Abdurrahman Wahid kembali ke Pesantren Tambak Beras Jombang. Disana ia mengurus sekolah Mu'allimat. Namun karena kerinduannya pada Yogyakarta, memaksa Abdurrahman Wahid untuk kembali pada tahun 1963 ke Pesantren Krapyak sampai 1964.

Pada tahun yang sama 1963, Abdurrahman Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.

Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa; ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jendral Suharto

menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Abdurrahman Wahid, yang ditugaskan menulis laporan.

Abdurrahman Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30 S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad Gus Dur pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Gus Dur dengan cepat belajar. Gus Dur juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Baghdad pada tahun 1970, Abdurrahman Wahid meneruskan studinya ke Belanda, dan belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikan di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda ia pergi ke Jerman dan Perancis sebelum ia kembali ke Indonesia pada tahun 1971. di Indonesia ia sibuk bergabung dengan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Lembaga ini mendirikan majalah yang disebut *prisma* dan wahid menjadi kontributor pada majalah ini dengan aktif menjadi seorang penulis yang handal. Kemudian pada tahun 1977 ia bergabung di universitas Hasyim

Asy'ari dengan menjadi dekan di Fakultas Usuluddin sekaligus aktif memberikan mata kuliah pada Fakultas Tarbiyah dan Usuluddin.⁸

Menurut catatan, sebelum ke Jakarta untuk mengembangkan dirinya , sekitar tahun 1974 Gus Dur sempat ke IAIN Sunan Ampel Surabaya, awalnya ingin menjadi seorang dosen, disebabkan tidak adanya ijazah resmi maka Gus Dur ditolak, sekalipun ia pernah belajar di al-azhar mesir dan di Baghdad. Akibatnya Gus Dur dianjurkan untuk kuliah selama setahun di fakultas adab, sekalipun diterimanya tapi tetap saja beliau tidak meresponnya sebab proses kuliah hanya dilakukan dalam satu semester.⁹

2. Penghargaan KH.Abdurrahman Wahid

Berbagai penghargaan telah diterima oleh Gus Dur sebagai seorang tokoh yang selalu memperjuangkan kaum minoritas. Pada tahun 1993 Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang prestisius untuk katagori Community Leadership. Pada Maret 2004 Gus Dur dinobatkan sebagai “Bapak Tionghoa” di Klenteng Tay Kak Sie.

Gus Dur juga mendapat penghargaan dari simon Wiesenthal center, sebuah yayasan yang bergerak dipenegakan Hak Asasi Manusia, itu diberikan kepada salah satu tokoh yang selalu memperjuangkan HAM.

Tak hanya itu Gus Dur juga mendapatkan penghargaan dari mebal valor karena dinilai telah berani membela kaum minoritas kerana telah membela kaum minoritas yakni konghuchu dalam memperoleh hak-haknya yang sempat

⁸ Ibid, h.123-134.

⁹ Wasid, *Gus Dur sang guru bangsa*, op. cit. h. 90

terpasung tepatnya pada masa orde baru dan Gus Dur juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi *Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study*. Pada 21 Juli 2010, meskipun telah meninggal, ia memperoleh *Lifetime Achievement Award* dalam Liputan 6 Awards 2010. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Sinta Nuriyah, istri Gus Dur.

Pada 11 Agustus 2006, Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006. Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gus Dur dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan Butet Kertaradjasa, pemimpin redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni, dan Ketua Komisi Nasional Perempuan Chandra Kirana. Mereka berhasil menyisihkan 23 kandidat lain.

B. Budaya Kosmopolitan dalam pandangan KH. Abdurrahman Wahid

Secara etimologi kosmopolitan berasal dari kata *kosmos* yang berarti jagat raya, sedangkan kosmopolitan itu sendiri merupakan penduduknya dari berbagai penjuru; yang memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas¹⁰. Dalam pandangan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur konsep kosmopolitan ini secara praksis menghilangkan batasan etnis, dalam kuatnya

¹⁰ Pius oportanto, M Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolla. 2001), h. 376

pluralitas kebudayaan.¹¹ Sehingga yang tercermin dari budaya kosmopolitan ini adalah penanaman ajara-ajaran islam dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran universal *kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kesetaraan, dan persaudaraan* yang dilandasi wahyu ketuhanan dan tauhid. Dalam pandangan Fethullah Gülen memandang bahwa kosmopolitanisme pada dasarnya memberi ruang penting pada peran individu dalam membentuk komunitas. Dengan dampak globalisasi pada relasi-relasi sosial, kosmopolitanisme menegaskan bahwa perbedaan kultur individu, kelompok dan bangsa, dan dialog antar kelompok tersebut, sebagai batu pijakan dalam membangun tatanan komunitas global.¹²

Kerangka untuk membangun budaya kosmopolitan dalam dunia pendidikan Islam maka dalam proses pelaksanaan pendidikan harus menghilangkan batasan etnis, suku, ras, serta penanaman nilai-nilai ajaran universal agama dalam rangka memperoleh output yang memiliki wawasan yang luas sehingga menghasilkan suatu budaya kosmopolitan dalam tatanan dunia global seperti halnya sekarang ini.

Pandangan dalam kosmopolitan Islam adalah suatu pandangan yang mengakui perlunya reformulasi substansial dari peradaban yang ada, kerangka institusional, moral, spiritual, dan etika sosial guna merespons hak-hak dasar universal, menghormati agama, ideologi dan kultural lain serta menyerap sisi-

¹¹Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institut. 2007), h. xxii

¹² Harold Caparne Baldry, *The Unity of Mankind in Greek Thought* (Cambridge: Cambridge University Press, 1965). H. 1 -25

sisi positif yang ditawarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Budaya Islam kosmopolitan menuntut adanya sikap inklusif, pengakuan adanya pluralisme budaya dan heterogenitas politik sehingga umat Islam dapat berdialog dengan peradaban global, memunculkan sikap kritis, dan mengoreksi budaya sendiri.

Ajaran-ajaran dan nilai-nilai ini dapat diterapkan di mana dan kapan saja, semuanya dapat dilakukan sesuai dengan budaya setempat. Islam dalam paradigma ini sangat mengapresiasi kebudayaan lokal, bahkan berpendapat bahwa *al-'âdatu muhakkamah* (adat atau tradisi dapat dijadikan hukum). Pendek kata adalah islam yang *rahmatan lil-alamin* (yang memberikan rahmat bagi seluruh alam).¹³

Jadi pendidikan Islam ini merupakan pendidikan dilandasi atas nilai-nilai universalisme ajaran Islam. Toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan dan keprihatinan yang penuh kearifan akan keterbelakangan kaum Muslim sendiri akan memunculkan tenaga luar biasa untuk membuka belunggu kebodohan dan kemiskinan yang begitu kuat mencekam kehidupan mayoritas kaum Muslim dewasa ini. Dari proses itu akan muncul kebutuhan akan kosmopolitanisme baru yang selanjutnya akan bersama-sama faham dan ideologi lain turut membebaskan manusia dari ketidakadilan struktur sosial-ekonomis dan kebiadaban rezim-rezim politik yang dhalim. Hanya dengan menampilkan universalisme baru dalam ajarannya dan kosmopolitanisme baru dalam sikap hidup para pemeluknya, Islam akan mampu memberikan perangkat sumber daya manusia yang diperlukan oleh si

¹³ Abdurrahman Wahid - <http://gusdur.net>. Diakses pada: 10 april 2012. Jam 23.00 wib

miskin untuk memperbaiki nasib sendiri secara berarti dan mendasar, melalui penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang prihatin dengan nasib orang kecil.

Bahwa kosmopolitanisme tercapai atau berada pada titik optimal, manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum Muslim dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non-Muslim). Kosmopolitanisme seperti itu adalah kosmopolitanisme yang kreatif, karena di dalamnya warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran. Situasi kreatif yang memungkinkan pencarian sisi-sisi paling tidak masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan, situasi cair yang memaksa universalisme ajaran Islam untuk terus-menerus mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk nyata, bukannya nyata dalam postulat-postulat spekulatif belaka.

Implikasi dari penanaman nilai-nilai pemahaman kosmopolitanisme dalam pendidikan Islam itu sendiri sangatlah luas, karena kita ketahui bahwa proses dalam pendidikan itu sendiri kita jalani sepanjang hayat. Dampak dari kosmopolitanisme budaya ini akan memantulkan kehidupan beragama yang elektik.¹⁴

Dialog dalam masyarakat dunia yang kompleks. Kosmopolitanisme pada dasarnya memberi ruang penting pada peran individu dalam membentuk komunitas. Dengan dampak globalisasi pada relasi-relasi sosial,

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, op.cit. h xxiii.

kosmopolitanisme menegaskan bahwa perbedaan kultur individu, kelompok dan bangsa, dan dialog antar kelompok tersebut, sebagai batu pijakan dalam membangun tatanan komunitas global. Secara umum kosmopolitanisme merupakan harapan ideal tentang warga dunia tanpa perbatasan, Pandangan lintas kultural dalam kosmopolitan ini member arti akan pentingnya dialog dalam sebuah komunitas dengan landasan saling mengakui dan menghargai, dimana perbedaan pada manusia dianggap sebagai inti dalam menciptakan kehidupan dunia yang damai.¹⁵

Sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam UU SISDIKNAS “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.¹⁶

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.¹⁷

C. Indonesia Dan Budaya Kosmopolitan

¹⁵ Paper dipresentasikan pada kuliah Metodologi Studi Islam, Program Pascasarjana (S3) IAIN Sunan Ampel Surabaya di bawah bimbingan Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, MA.

¹⁶ UUSISDIKNAS, Pasal 1 ayat 1

¹⁷ Ibid, ayat 2

Indonesia sendiri yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara (*philosophische grondslaag*) Republik Indonesia.¹⁸ Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Atas dasar ini, Pancasila merupakan *intelligent choice* karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak hendak menghapuskan perbedaan (*indifferentism*), tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam seloka “Bhinneka Tunggal Ika”.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/indonesia_pancasila

mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).”

Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral secara utuh dan menyeluruh sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara.

Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar atau asas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.¹⁹

¹⁹ http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?id=238/hl=id/Inspirasi_Dari_Pemikiran_Gus_Dur

Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Mahaesa. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:

1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 3. Persatuan Indonesia, yang berKetuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, berKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, yang
-

ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sebuah pernyataan menarik yang diungkapkan oleh Gus Dur menyatakan tanpa Pancasila negara akan bubar.²⁰ Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya. Tidak peduli apakah dia dikebiri oleh angkatan bersenjata atau dimanipulasi oleh umat Islam, disalahgunakan oleh keduanya.²¹

Pemikiran Gus Dur dapat dibingkai menjadi lima bagian; ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha-Esa

Dinyatakan Gus Dur dalam penekanannya pada dimensi etis dari agama, bukan dimensi ideologis dan institusional. Agama adalah sesuatu kekuatan moral, bertujuan menjadikan manusia dan masyarakat baik dan lebih

²⁰ Murod Al-Barbasy , Ma'mun, <http://artikel-media.blogspot.com/2010/01/gus-dur-dan-islam.html>. Diakses pada: 10 april 2012. Jam 23.00 wib.

²¹ Sastrapratedja, M., Mempertahankan Pancasila Sebagai Asas Berbangsa <http://www.gusdur.net/Berita/Detail/?id=398/hl=id/>. Diakses pada: 10 april 2012. Jam 23.00 wib

baik, bukan untuk membangun kekuasaan. Dalam hal ini, yang diperjuangkan adalah penegakan etika Islam, bukan ideologi Islam untuk negara. Islam diposisikan sebagai etika sosial dan bukan sebagai kekuatan politik. Karena itulah bagi Gus Dur ideologi negara hanya satu yaitu Pancasila.²² Oleh karena itu, hubungan agama dan negara dapat diringkas dalam tiga hal. *Pertama*, dengan mendasarkan ideologi negara tidak pada agama, maka terbuka pluralisme. Karena negara berada di atas semua agama, dalam arti melindungi semua agama dan menjamin kebebasan beragama. *Kedua*, dengan tidak menekankan aspek ideologis dan institusional, agama tidak berhadapan dengan negara sebagai kekuasaan sehingga agama dan negara tidak perlu diperlawankan tetapi saling melengkapi.²³ *Ketiga*, negara dan agama memiliki otonominya masing-masing dan tidak dibenarkan saling mendominasi atau saling memeralat.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Gus Dur mengemukakan nilai-nilai universal Islam, yang tercermin dalam lima jaminan dasar yang diberikan agama samawi, yakni: *Pertama*, jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. Implikasi dari jaminan ini adalah adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali sesuai dengan hak masing-masing. *Kedua*, jaminan akan keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama-

²² Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, op.cit. h 202

²³ Kacung Marijan, dan Ma'mun Murod Al-Brebesy (Ed.), *Abdurrahman Wahid Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia, 1999), h.93-94.

jaminan ini menjadi landasan hubungan antar-warga masyarakat atas dasar sikap saling menghormati. *Ketiga*, jaminan akan keselamatan keluarga dan keturunan. Di sini, kesucian keluarga harus dilindungi. Keluarga juga tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dan keluarga memiliki kebebasan untuk melakukan eksperimentasi dengan pandangan hidupnya sendiri dan untuk menguji garis batas kebenaran sebuah keyakinan. *Keempat*, jaminan akan keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau pengusuran di luar prosedur hukum. Jaminan ini merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu. *Kelima*, jaminan atas keselamatan hak milik dan profesi. Jaminan ini merupakan jaminan kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri mengenai keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan yang membayangi.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini mengandung makna nasionalisme, tetapi nasionalisme politik, bukan nasionalisme etnik. Terkait nasionalisme ini, Gus Dur berusaha menentang setiap gerakan yang menjurus pada sektarianisme dan primordialisme. Pada tahun 1991, didirikan Forum Demokrasi dan ketuanya adalah Gus Dur. Salah satu kepedulian Forum Demokrasi ini adalah gejala meningkatnya sektarianisme. Dan sila ini juga dibuktikan dengan sikap Gus Dur yang anti diskriminasi terutama terhadap minoritas, anti primordialisme, dan anti sektarianisme.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai dan penerapan sila ini terwujud secara jelas dalam pikiran Gus Dur tentang demokrasi, yang menyamakan kedudukan semua warga negara di muka-muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin, dan bahasa ibu. Agama tentu akan memiliki tempat dalam demokrasi asalkan memiliki watak membebaskan. Agama akan mencapai tata baru yang membebaskan, apabila agama telah sampai pada pencapaian sejumlah nilai dasar universal berupa pelayanan agama kepada warga masyarakat tanpa pandang bulu. Konkretnya, dengan ikut ambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan, penegakan kedaulatan hukum, dan kebebasan menyatakan pendapat.

Selain itu juga terwujud dalam penekanan Gus Dur tentang Islam yang merupakan kekuatan kultural. Demokrasi, hanya akan berkembang jika memiliki dasar budaya, dimana keberagaman pandangan dan pendapat sebagai sesuatu yang wajar dan diterima. Lalu, demokrasi berkembang dengan memperkuat masyarakat sipil. Bagaimana dengan pemerintah yang demokratis? Pemerintahan yang demokratis, kata Gus Dur, ciri pokoknya adalah penggunaan cara-cara yang menentang kekerasan dan pelecehan terhadap kaum minoritas.

Dengan demikian, demokrasi merupakan alternative terhadap fundamentalisme dan membuka pluralitas. Demokrasi kemudian tidak

menghapus kekuasaan tetapi mengubah kekuasaan menjadi kewenangan yang akuntabel dan dibatasi oleh hukum.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Terkait sila ini, Gus Dur memaknainya dengan empat hal. *Pertama*, sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Hal ini terwujud dalam usahanya untuk menyatakan pada kaum Muslim akan pentingnya mereformulasi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang terjadi.²⁴ *Kedua*, soal keadilan terkait dengan kewajiban agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkret dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal ini merupakan nilai-nilai yang sebenarnya terkandung dalam setiap agama, termasuk agama Islam. *Ketiga*, keadilan tidak hanya mencakup lingkup mikro, perorangan, melainkan juga lingkup makro, yaitu kehidupan masyarakat. *Keempat*, keadilan terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat-keadilan bersifat struktural sehingga menuntut transformasi struktural.

D. Islam dan Budaya Kosmopolitan

Budaya Kosmopolitanisme Islam sudah terjadi sejak masa-masa awal perkembangan Islam. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan Islam untuk

²⁴ Ibid, hal, 97

berinteraksi dan menyerap unsur-unsur lain di luarnya. Keterbukaan itulah yang memungkinkan kaum muslim selama sekian abad menyerap berbagai macam manifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari peradaban lain.²⁵ Kosmopolitanisme peradaban Islam bagi Gus Dur muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, heterogenitas politik dan kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad

Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting dan yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya. Rangkaian ajaran yang meliputi berbagai bidang, seperti hukum agama (fiqh), keimanan (tawhid), etika (akhlaq), seringkali disempitkan oleh masyarakat hingga menjadikannya (kesusilaan belaka) dan sikap hidup, menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan (al-insaniyyah).

Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum, perlindungan warga masyarakat dari kedzaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderitanya kekurangan dan pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan, semuanya jelas menunjukkan kepedulian di atas. Sementara itu, universalisme yang tercermin dalam ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan itu diimbangi pula oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam sendiri.

²⁵ Ibid, h. 4

Salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar itu tersebar dalam literatur hukum agama (al-kutub al-fiqhiyyah) lama, yaitu jaminan dasar akan :

- 1) Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum.
- 2) Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama.
- 3) Keselamatan keluarga dan keturunan.
- 4) Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan
- 5) Keselamatan profesi.

Jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Hanya dengan kepastian hukumlah sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antara sesama warganya, sedangkan kedua jenis persamaan itulah yang menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam arti sebenar-benarnya.

Secara keseluruhan kelima jaminan dasar atas menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Ketika universalitas ajaran Islam dimunculkan dan diterapkan dalam setiap lembaga pendidikan khususnya menjadi sangat urgen ditengah maraknya kekerasan yang terjadi yang mengatasnamakan agama.

Karena selama ini semua jaminan dasar itu hanya menyajikan kerangka teoritik atau hanya mungkin sebagai moralitas belaka yang tidak berfungsi dan tidak didukung oleh peradaban Islam sendiri. Gus Dur menyatakan bahwa Sebenarnya nilai kosmopolitan dari peradaban Islam sendiri telah muncul sejak awal kemunculan Islam sendiri. Yaitu dimulai dengan cara nabi Muhammad saw mengatur pengorganisasian masyarakat hingga munculnya ensiklopedis Muslim awal seperti Al-Jahiz pada abad ketiga hijriyah, mencerminkan proses saling menyerap dengan peradaban-peradaban lain di sekitar dunia Islam pada waktu itu. Yaitu mulai dari sisa-sisa peradaban Yunani kuno yang berupa hellenisme hingga peradaban anak benua India.

Tampak dari sosok Gus Dur menginginkan suatu budaya inklusif dalam rangka menciptakan suatu peradaban yang tinggi. Kosmopolitanisme akan muncul dalam sejumlah unsur dominan seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas politik. Dalam rangka menciptakan suatu budaya kosmopolitan tersebut dalam kehidupan nyata sangat sulit ditengah kehidupan sekarang ini.

Ketika budaya kosmopolitan mencoba diterapkan dalam dunia pendidikan maka ketika ada suatu perbedaan baik itu pendapat atau persepsi

itu merupakan suatu hal yang lumrah. Dengan adanya hal itu dunia pendidikan seharusnya memberikan suatu ruang untuk memfasilitasi akan terlaksananya suatu dialogis sehingga memunculkan sikap progresif yang tak jarang memunculkan suatu antitesis terhadap tesis sebelumnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai kosmopolitan dalam ajaran Islam tercapai secara optimal manakala terjadi keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum Muslim dan kebebasan berfikir semua peserta didik yang non muslim. Hal itu merupakan suatu budaya kosmopolitan yang kreatif karena di dalamnya setiap peserta didik mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari karusan berpegang kepada kebenaran.